1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Juli	2026	2,43 % *(Y-on-Y),*	-0,14 % (*M-to-M*)
Agustus	2026	2,59 % *(Y-on-Y),*	-0,40 % (*M-to-M*)
September	2026	2,67 % *(Y-on-Y),*	-0,35 % (*M-to-M*)

   - Pada Juli 2026 terjadi inflasi *Year-on-year (Y-on-Y)* Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,43 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,18. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 3,11 % dengan IHK sebesar 113,30 dan Inflasi terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,82 % dengan IHK sebesar 111,26. Inflasi y-on-y Juli 2026 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,50 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,82 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,92 %; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,07 %; kelompok kesehatan sebesar 2,92 %; kelompok transportasi sebesar 3,55 %; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,12 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,37 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,49 %. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan indeks harga, yaitu kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,10 % dan kelompok pendidikan sebesar 2,48 % pada Juli 2026
   - Pada Agustus 2026 terjadi inflasi *Year-on-year (Y-on-Y)* Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,59 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,74. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 4,04 % dengan IHK sebesar 112,85 dan Inflasi terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,53 % dengan IHK sebesar 109,86. Inflasi y-on-y Agustus 2026 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,53 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,88 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,96 %; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,97 %; kelompok kesehatan sebesar 2,04 %; kelompok transportasi sebesar 3,97 %; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,33 %; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,52 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,93 %. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan indeks harga, yaitu kelompok pendidikan sebesar 2,63 % pada Agustus 2026.
   - Pada September 2026 terjadi inflasi *Year-on-year (Y-on-Y)* Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,67 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,35. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 3,58 % dengan IHK sebesar 110,87 dan Inflasi terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,04 % dengan IHK sebesar 108,48. Inflasi y-on-y September 2026 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,82 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,80 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,84 %; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,34

%; kelompok kesehatan sebesar 2,01 %; kelompok transportasi sebesar 4,03 %; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,50 %; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,65 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,45 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,03 %. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan indeks harga, yaitu kelompok pendidikan sebesar 3,25 % pada September 2026.

- Risiko ke Depan (Triwulan IV-2026):
    a. Mencermati perkembangan harga terkini dan beberapa indikator, inflasi bulanan Provinsi NTT diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan berada pada rentang 0,04% - 1,04% *(M-to-M)* di bulan Oktober 2026. Inflasi pada kelompok pangan diprakirakan mengalami peningkatan pada Oktober 2026 hingga akhir tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya kondisi pasokan akibat kondisi panen yang berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak dari el nino pada semester II 2026.
    b. Beberapa komoditas yang berisiko mengalami kenaikan inflasi antara lain beras, tomat, cabai rawit, kangkung dan daging ayam ras. Sementara itu pada kelompok lainnya, dinamika kondisi geopolitik masih menyebabkan tingkat harga komoditas global volatile, sehingga perlu menjadi perhatian dalam penurunannya terhadap tingkat harga domestik.
    c. Pascabencana yang terjadi di Pulau Flores perlu diantisipasi terkait dengan peningkatan harga pada komoditas – komoditas bahan bangunan (semen, besi beton, batako, dan lain-lain) diakibatkan oleh peningkatan permintaan rekonstruksi, utamanya pada Kab/Kota IHK yang terdampak bencana seperti Maumere dan Kab. Ngada.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kendala yang dihadapi
    - Kondisi geografis NTT sebagai daerah kepulauan menyebabkan ketergantungan pada transportasi laut dan udara, sehingga biaya logistik berpotensi adanya disparitas harga antarkabupaten/kota yang tinggi.
    - Perubahan pola hujan, musim kemarau, dan potensi dampak El Nino dapat memengaruhi produksi pertanian, ketersediaan air, serta kelancaran pasokan pangan dari daerah produsen.
    - Kenaikan harga bahan bakar minyak mempengaruhi biaya transportasi udara, serta biaya logistik yang berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan.
    - Pascagempa di Pulau Flores mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi sehingga memengaruhi distribusi stok bahan pangan

2. Klasifikasi permasalahan:
    - **Keterjangkauan Harga**
        - Inflasi tahunan NTT meningkat dari 2,43% pada Juli menjadi 2,59% pada Agustus dan 2,67% pada September 2026, sehingga upaya menjaga daya beli masyarakat tetap menjadi tantangan.
        - Kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama emas perhiasan, pelumas/oli

mesin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan beberapa jenis ikan, berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat.
- Pelaksanaan Program yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal (DIF) belum optimal

◦ **Ketersediaan Pasokan**
- Bencana Gempa Bumi di Flores menimbulkan risiko terhadap ketersediaan pasokan karena berdampak pada lahan pertanian, aktivitas pasar, dan rantai pasok di sejumlah wilayah.
- Permintaan daging ayam ras, daging sapi, dan aneka sayuran berpotensi meningkat sejalan dengan kebutuhan SPPG dan konsumsi masyarakat.
- Pasokan komoditas hortikultura dan pangan dari sentra produksi perlu dipantau secara berkala untuk mengantisipasi perubahan musim dan ketidakseimbangan pasokan-permintaan.

◦ **Kelancaran Distribusi**
- Karakteristik Provinsi NTT sebagai wilayah kepulauan menyebabkan distribusi komoditas antardaerah bergantung pada kelancaran transportasi dan biaya logistik.
- Gangguan akses dan distribusi pascabencana di Pulau Flores perlu diantisipasi agar penyaluran barang, termasuk bahan bangunan dan kebutuhan pokok, tetap lancar.
- Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah meningkatkan kerentanan harga apabila terjadi keterlambatan pengiriman atau kenaikan biaya angkutan.

◦ **Komunikasi Efektif**
- Koordinasi TPID Provinsi dan TPID kabupaten/kota perlu terus diperkuat untuk merespons perubahan harga dan pasokan secara cepat.
- Pemantauan harga dan ketersediaan komoditas strategis perlu dilakukan secara berkala sebagai dasar penetapan langkah pengendalian inflasi.
- Penyampaian informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan pasokan, dan pelaksanaan program pengendalian inflasi perlu dilakukan secara konsisten untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya Pengendalian Inflasi oleh Provinsi NTT, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT (TPID NTT) berupa kegiatan melakukan pengendalian Inflasi di antaranya:

◦ TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri secara *hybrid* setiap minggu.
◦ **17 Juli 2026** TPID Provinsi NTT melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian yang dipimpin oleh Gubernur NTT berlokasi di kantor BPS Provinsi NTT
◦ **7 Agustus 2026** TPID Provinsi NTT melakukan sidak pasar pada 3 Lokasi pasar di kota Kupang menjelang HUT RI ke 81
◦ **27 Agustus 2026** TPID Provinsi NTT melakukan sidak pasar guna mengecek harga komoditas pascabencana pada 3 Lokasi pasar di kota Kupang
◦ **27 Agustus 2026** TPID Provinsi NTT melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi di Aula El Tari NTT
◦ **4 September 2026** TPID Provinsi NTT melakukan Rapat Koordinasi pengendalian inflasi daerah NTT di Hotel Harper Kupang terkait pemulihan ekonomi pascagempa Flores

22 September 2026 Biro Perekonomian beserta TPID Kabupaten TTS melaksanakan **sidak pasar** di Pasar Inpres Soe, Kabupaten TTS
- **22 September 2026** Biro Perekonomian beserta TPID Kabupaten TTS melaksanakan **Rapat Koordinasi pengendalian inflasi daerah** di Kabupaten TTS

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan III 2026, inflasi year-on-year Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak dari 2,43 % pada Juli menjadi 2,59 % pada Agustus dan 2,67 % pada September. Secara bulanan, NTT mengalami deflasi pada Juli sebesar 0,14 %, Agustus sebesar 0,40 %, dan September sebesar 0,35 %. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi tahunan meningkat secara bertahap, meskipun tingkat harga bulanan mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut. Pada September 2026, inflasi tahunan masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1 %. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta transportasi termasuk kelompok dengan kenaikan indeks harga tahunan yang menonjol dalam uraian data dari Badan Pusat Statistik.

Menghadapi Triwulan IV-2026, pengendalian inflasi perlu difokuskan pada antisipasi risiko kenaikan harga pangan, pengamanan pasokan menjelang akhir tahun, pemantauan harga bahan bangunan di wilayah terdampak bencana, serta kelancaran distribusi antarpulau. Pelaksanaan strategi 4K perlu didukung oleh koordinasi lintas instansi, pemantauan harga dan pasokan secara rutin, serta intervensi yang tepat sasaran sesuai perkembangan kondisi masing-masing kabupaten/kota.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- KETERJANGKAUAN HARGA
  - Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada pasar-pasar di Provinsi NTT untuk secara langsung mengintervensi tingkat harga pada pasar, serta pelaksanaan utamanya menjelang HBKN yang berpotensi besar meningkatkan harga komoditas strategis.
  - Mendorong pengadaan Bantuan Pangan (Bapang) dapat mengurangi tekanan terhadap pasar dan mempermudah keterjangkauan harga.
- KETERSEDIAAN PASOKAN
  - Optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Bantuan Pangan melalui pedagang pasar dan pengecer untuk menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau.
  - Penguatan proyeksi neraca pangan sebagai *early warning system* dan intervensi kebijakan pengendalian inflasi yang 3T (tepat sasaran, tepat waktu dan tepat lokasi)
  - Penguatan penyimpanan dan pengolahan pascapanen untuk mengurangi susut pangan serta menjaga ketersediaan antar musim.
  - Aktivasi KAD B to B dengan daerah produsen intra dan antar Provinsi, terutama untuk komoditas beras dan sayur yang sering menjadi penyumbang defisit neraca pangan.
  - Melanjutkan Program Gemar Tani (Gerakan Menanam Perkarangan Rumah Dengan Tanaman Pengendalian Inflasi) serta kembali mengintensifkan program *Urban Farming* Komoditas Hortikultura.
  - Melakukan memperbarui harga komoditas secara berkala.
- KELANCARAN DISTRIBUSI
-

Membuat Pemetaan Jalur Distribusi, Distributor, dan Jumlah Pasokan di Daerah.
    - Membuat pemetaan Daerah Sentra Produksi Komoditas di Daerah (Surplus dan Defisit) Untuk Kemudian di Lakukan Kerja sama Antar Daerah (KAD).
- KOMUNIKASI EFEKTIF
    - Menggiatkan imbauan belanja bijak untuk mengarahkan masyarakat agar belanja cukup pada momen HBKN
    - Melakukan Rapat Koordinasi / Rapat Teknis TPID Secara Berkala (Minimal satu kali Sebulan).
    - Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Media, Baik Cetak Maupun Elektronik Terkait Publikasi Harga, dan Kegiatan TPID Lainnya di Daerah.
    - Melakukan Mapping Harga Komoditas Secara Berkala.

-